

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akhir-akhir ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahuinya.

Menurut data Bank Indonesia, kini sudah ada 11 Bank Umum Ssyariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat dari 1.692 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.574 di tahun 2012, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar 25,31%.

Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp.179 Triliun (4,4 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK Rp. 137 Triliun. Suatu hal yang luar biasa adalah, total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp 139 Triliun, melebihi jumlah DPK, Ini berarti FDR perbankan

syariah di atas 100 persen. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakkan perekonomian, sangatlah besar.¹

Perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat di Indonesia tidak lepas dari peran ulama dalam mensosialisasikan ekonomi syariah. Ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan mereka telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.²

Sebenarnya peran ulama dalam pengembangan ekonomi syariah sudah berlangsung lama. Sebelum sistem ekonomi konvensional dikenal, masyarakat sudah melakukan transaksi berdasarkan muamalah Islam. Sekarang ini para ulama dituntut untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah yang lebih modern.

Semakin maraknya bank syariah, ulama dituntut mengembangkan perbankan syariah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Dengan sosialisasi itu diharapkan perbankan syariah bisa lebih berkembang dari tahun ke tahun.

Melihat prospek yang ada perbankan syariah pasti mampu bersaing dengan bank-bank konvensional yang telah ada. Dewasa ini bank syariah menawarkan sistem yang lebih bagus dibandingkan bank konvensional. Dengan dukungan mayoritas penduduk muslim, ekonomi syariah diharapkan lebih berkembang dengan pesat.

¹<http://www.eramuslim.com/peradaban/ekonomi-syariah/peluang-tantangan-dan-outlook-perbankan-syariah-2013.htm> Oleh Agustianto, Ketua IIAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) dan Dosen Pascasarjana UI 27/12/2013 : 07.46 pm.

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press 2001), h. 233.

Dalam mengembangkan ekonomi syariah setidaknya ada beberapa peran penting ulama, di antaranya sebagai penjelas kepada masyarakat mengenai pentingnya berekonomi secara syariah. Dalam pengajaran di pesantren-pesantren misalnya ulama mengajarkan sistem bermuamalah. Dengan pengajaran-pengajaran di pesantren mengenai ekonomi syariah para santri diharapkan mampu bermuamalah dan merealisasikannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya sistem pengajaran ekonomi syariah sama pentingnya dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Selain itu peran ulama pun dituntut untuk memulihkan perekonomian bangsa. Perekonomian bangsa yang telah terpuruk ketika adanya krisis moneter di tahun 1998, memunculkan ekonomi syariah yang menjadi primadona.

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak di tingkat nasional, berimbas pada perkembangan ekonomi syariah di setiap daerah, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak mengherankan DIY menjadi salah satu daerah yang menyambut baik sistem ekonomi syariah antara lainnya kaum mayoritas penduduk muslim.

Fenomena tersebut disambut baik oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah baik di tingkat Pusat, Wilayah maupun Daerah. Sebagaimana amanat Tanwir di Yogyakarta (2007) dan Tanwir di Bandar Lampung (2009), Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memfokuskan perhatian terhadap Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Kepentingan adanya perhatian dari Pimpinan

Pusat ini adalah untuk tetap menjaga misi dan fungsi AUM bagi dakwah Persyarikatan dengan tetap harus dikelola secara profesional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pimpinan Pusat juga tengah berusaha menyiapkan Qa'idah Amal Usaha baru yang lebih representatif, baik bagi pengembangan AUM itu sendiri agar sehat dan kompetitif maupun bagi terjaganya identitas Persyarikatan serta fungsi perkaderan dan misi dakwah Muhammadiyah di setiap AUM. Dalam hal ini Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM Kota Yogyakarta dan PDM Kab. Bantul dituntut untuk merealisasikan amanat Tanwir.³

Tiga rancangan pokok Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM Kota Yogyakarta periode 2005-2010 adalah Silaturahmi Pengusaha Muhammadiyah; Pelatihan Kewirausahaan; serta Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan (terkait isu ekonomi Islam dan pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah). Beberapa kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan adalah Silaturahmi Nasional Pengusaha Muhammadiyah (*Business Gathering*), Silaturahmi dengan Wapres RI di Istana Negara (2007) dan Silaturahmi dengan Mantan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (2008).⁴

³ Sedangkan untuk menahan intervensi ideologi dari pihak luar Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 149/KEP/I.O/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah point satu yang berisi; Muhammadiyah dengan seluruh anggota pimpinan, amal usaha, organisasi otonom, majelis dan lembaga, sekretarita/kantor dan berrbagai lini/struktur organisasi serta segala usaha di dalamnya harus bebas dari berbagai paham, misi dan kepentingan pihak lain yang secara langsung maupun tdak langsung, terbuka maupun terselubung, dapat merugikan dan merusak Persyarikatan Muhammadiyah.

⁴ Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke 44, Jakarta. 2010, h. 61.

Sedangkan di PDM Kabupaten Bantul, tepatnya tanggal 27 Mei 2006, Bantul khususnya dikagetkan dengan adanya gempa bumi yang cukup dahsyat. Gempa yang meluluh lantakkan bangunan fisik, ekonomi, sosial bahkan cultural tersebut cukup membuat semua orang terhenyak. Ribuan korban jiwa tak tertolong disamping luka-luka. Hampir semua AUM rusak tak dapat digunakan, namun Alhamdulillah kantor PDM Kabupaten Bantul masih diselamatkan sehingga bisa dimanfaatkan untuk pusat komando penanganan bencana.

Walaupun sebagian besar anggota PDM Kabupaten Bantul menjadi korban, namun masih tetap harus menjalankan roda organisasi untuk penanganan dan pemulihan pasca gempa, terlebih saat itu organisasi tingkat cabang maupun ranting “mati”.

PDM Kabupaten Bantul melalui program Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah mengadakan kegiatan berupa pendirian cabang bank Pembiayaan Rakyat Syariah BDW dan pendirian koperasi Jasa Keuangan Syariah di beberapa PCM yang potensial.⁵

Dengan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik mengambil judul ***“Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi Komparatif antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul)”***

⁵ Laporan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul pada Musyawarah Daerah, 2010, h. 34.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Karena luasnya pembahasan ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah kabupaten Bantul di Yogyakarta.

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan efisien dalam mencapai tujuan, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul bagi pengembangan ekonomi syariah, apakah diterapkan dengan baik atau tidak?
2. Bagaimana strategi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul untuk merealisasikan pengembangan ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Mengkaji kebijakan-kebijakan dan strategi yang diambil oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan ekonomi syariah.

2. Melihat perkembangan ekonomi syariah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis mengenai perkembangan ekonomi syariah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
2. Skripsi ini diharapkan menjadi sebagai bahan pemikiran atau masukan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul untuk mempermudah pengembangan ekonomi syariah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan riset dengan dua metode yaitu :

1. Riset lapangan (*field research*)

Riset lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan atau kepada responden.⁶

⁶ E. Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi 2010), h. 28.

Riset lapangan yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pihak pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul serta pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini untuk mendapatkan keakuratan data-data lapangan.

2. Riset kepustakaan (*library research*)

Riset kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.⁷

Riset kepustakaan dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh dari data lapangan. Data yang diperoleh dari ikajian kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam masalah ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

Obervasi bermaksud untuk mengkaji tingkah laku yang dinilai kurang tepat diukur dengan tes, inventori, maupun kuisisioner.⁸

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.

⁷ *Ibid.* h. 30

⁸ *Ibid.*, h. 48.

Bantul, dengan melihat kebijakan dalam sebuah dokumentasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, serta melihat kondisi mengenai perkembangan ekonomi syariah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan.⁹

Wawancara dilakukan kepada perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul sehingga data yang diperoleh adalah data yang valid.

Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif yang dikembangkan dengan penulisan deskripsi yang akan menggambarkan secara jelas peranan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul dalam pengembangan ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

⁹ E. Mamang Sangadji, Sopiha, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi 2010), h. 48.

BAB I Pendahuluan

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- c. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- d. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan
- e. Sistematika Penulisan

**BAB II Deskripsi Tentang Konsep dan Teori untuk
Menjelaskan Realita yang Diteliti**

- a. Pengertian Kebijakan
- b. Pengertian Strategi
- c. Pengertian Pengembangan Ekonomi Syariah
- d. Teori Analisis Kebijakan

**BAB III Gambaran Umum Profil Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul**

- a. Profil Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul
- b. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Yogyakarta
- c. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten
Bantul

BAB IV **Analisis Kebijakan dan Strategi PDM Kota Yogyakarta dan PDM Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Ekonomi Syariah**

- a. Kebijakan-kebijakan dan Realisasi PDM Kota Yogyakarta dan PDM Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Ekonomi Syariah
- b. Dampak Kebijakan Pimpinan PDM Kota Yogyakarta dan PDM Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

BAB V **Penutup**

- a. Kesimpulan
- b. Saran